

ANALISIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA TANETE KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE MUSRENBANG
TOWARDS INCREASING DEVELOPMENT OF TANETE VILLAGE,
MAIWA DISTRICT, ENREKANG REGENCY*

NURUL SYAFIQA. RUSLANG T. FAJAR KADUNG

EMAIL: syafiqanurul04@gmail.com¹, tantawiruslang26@gmail.com²,

Fajarladung35@gmail.com³

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend Ahmad Yani No.KM.6, Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
91112

ABSTRAK

Nurul syafiqa, 2024 Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Prodi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare(UMPAR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Kec. Maiwa Kab.Enrekang. Metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan wawancara langsung.Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete terhadap peningkatan Pembangunan terlaksana dengan baik terbukti dari kegiatan Musrenbang yang melibatkan masyarakat dan bagaimana kerja sama dengan pemerintah Desa setempat. Pada saat pelaksanaan Musrenbang Masyarakat datang tidak hanya untuk menyepakati usulan terkait pembangunan yang akan dijalankan, tetapi juga saling mengajukan pendapat masing-masing. Menurut pemerintah Desa Tanete semua elemen masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa bisa memberikan tambahan usulan dan saran . Namun bisa atau tidaknya usulan tersebut dijalankan tetap menyesuaikan kondisi keuangan Desa.

Kata kunci: Musrenbang, Perencanaan, Desa

ABSTRACT

Nurul Syafiq, 2024 Analysis of the Implementation of Village Musrenbang on Increasing Development in Tanete Village, Maiwa Subdistrict, Enrekang Regency, Economic and Business Essay, Economics and Business Study Program, Muhammadiyah University of Parepare (UMPAR).

This research aims to determine the implementation of the Musrenbang Village in Tanete District. Maiwa, Enrekang Regency. The data collection methods and techniques used in this research were qualitative methods and direct interviews. Based on the results of this research, the implementation of the Tanete village Musrenbang to increase development was carried out well as evidenced by the Musrenbang activities that involved the community and how they collaborated with the local village government. During the Musrenbang implementation, the community came not only to agree on proposals related to the development that would be carried out, but also to submit their own opinions to each other. According to the Tanete Village government, all elements of society who are invited to the village development planning meeting can provide additional suggestions and suggestions. However, whether or not the proposal can be implemented still depends on the village's financial condition.

Keywords: Musrenbang, Planning, Village

PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sarana pemerintah di seluruh tingkat untuk menghimpun aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu cerminan praktik partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemerintahan. Baik dari jajaran pimpinan Daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu kemudian berbincang mengenai program daerahnya dengan tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Wasil, 2020:57).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan untuk menyusun dan membahas rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang diawali dengan Musrenbang Kelurahan/Desa, selanjutnya Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang di tingkat Kabupaten/kota, selanjutnya Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang tingkat Nasional untuk pelaksanaan terakhir Musrenbang. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Musrenbang di tingkat Provinsi sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan untuk kemajuan pembangunan yang lebih baik. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan untuk lingkup Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing

guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar (*stakeholders*) pemangku kepentingan Musrenbang daerah. komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan untuk menyusun dan membahas rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang diawali dengan Musrenbang Kelurahan/Desa, selanjutnya Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang di tingkat Kabupaten/kota, selanjutnya Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang tingkat Nasional untuk pelaksanaan terakhir Musrenbang. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Musrenbang di tingkat Provinsi sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan untuk kemajuan pembangunan yang lebih baik.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan untuk lingkup Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar (*stakeholders*) pemangku kepentingan Musrenbang daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menuturkan strategi penelitian adalah suatu cara secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid sebagai tujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu. Dengan kata lain, dalam melakukan penelitian hal yang termasuk penting yaitu memiliki strategi penelitian karena membantu peneliti pada saat melakukan penelitian dan proses yang dilakukan lebih terstruktur dan meningkatkan kualitas. Strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti melalui data-data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu efektifitas program pemberdayaan ekonomi Masyarakat peDesaan dalam mendukung Pembangunan daerah Desa Tanete Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang.

Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih Dua bulan lamanya Di mulai dari Januari sampai akhir Februari.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Enrekang Kecamatan maiwa Desa Tanete

Teknik pengumpulan Data

Sugiono 2018, teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kualitatif dari informan, dan lain-lain sesuai lingkup penelitian.

1. Observasi

Menurut Fuad dan Sapto mendefinisikan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation*. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Observasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan data mengenai suatu masalah sehingga dapat dipahami sebagai bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden yaitu lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendeta, ulama, Uztadz, Dai serta perangkat Desa dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah metode penelitian yang dilakukan terkait informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik foto, data, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Pada tahun 2022 perencanaan Pembangunan Desa melalui kegiatan Musrenbang Desa dilakukan untuk menyepakati rencana kerja pememrintah Desa (RKP Desa) tahun 2023 sedangkan kegiatan Musrenbang Desa untuk rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) telah dilakukan di awal periode yaitu dilaksanakan pada Rabu 22 Juni 2022. Bertempat di kantor Desa Tanete. Proses perencanaan Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan Musrenbang Desa, serta adanya peningkatan Pembangunan di berbagai sektor di Desa Tanete dipengaruhi beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan perencanaan harus turut dilibatkan dalam prosesnya. Sejalan dengan penelitian ini yang akan berfokus pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam Musrenbang Desa Tanete serta proses pengambilan Keputusan yang dilakukan.

faktor pendukung yang paling dominan dalam mensukseskan program Pembangunan Desa adalah pritisipasi masyarakat, dengan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan maupun Pembangunan Desa.



Gambar 5. 1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete.

Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Desa yakni dengan menghadiri kegiatan Musrenbang Desa. Pada saat proses pelaksanaan Musrenbang Desa masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan kegiatan Pembangunan yang belum di sampaikan dalam rancangan RKP Desa.

2. Transparansi

Transparansi di bangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi. Transparansi menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Desa dalam memberi informasi terkait Pembangunan yang sedang dijalankan.

Informasi terkait pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan Pembangunan yang dijalankan Desa disebarkan melalui bebrapa media seperti banner dan undangan.



Gambar 5. 2 Undangan Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete
Sumber Pemerintah Desa

Sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa terkait pelaksanaan Musrenbang Desa, pemerintah Desa Tanete memberikan undangan kepada masyarakat serta beberapa pihak terkait sesuai daftar yang ada dalam juknis. Pengumuman pelaksanaan Musrenbang Desa di lakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. undangan pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete di berikan kepada masyarakat pada tanggal 22 september 2022 sedangkan Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 28 september 2022.

3. Selektif

Selektif diartikan dengan melalui seleksi diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk memilih ataupun meyarif permasalahan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang optimis dalam Pembangunan Desa. program Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan menentukan prioritas Pembangunan.



Gambar 5. 3 Dokumen Kegiatan Musrenbang Desa Tanete

Sumber : Pemerintah Desa.

Prioritas Pembangunan yang akan di lakukan di Desa Tanete telah di rangkum dalam RPJM Desa yang telah dilaksanakan pada awal periode yaitu tahun 2021. Sebagai contoh usulan masyarakt prioritas Pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa tahun ketiga nantinya akan dimasukkan dan dilaksanakan pada RKP Desa tahun 2023. Penetapan prioritas masalah Pembangunan dilakukan berdasar permasalahan yang terjadi pada setiap kelompok yang ada di Masyarakat. serta harus memperhatikan urgensitas suatu permasalahan. Sehingga dibutuhkan kajian lapangan pada setiap Dusun yang ada di Desa Tanete.

Tabel 5. 1 Pembangunan Yang Menjadi Prioritas Pembangunan Tahun 2023

NO	Jenis Pembangunan	Kegiatan	Lokasi
1.	Fisik	Pelebaran Pekarangan Sekolah	Dusun Lo'ko
2.	Non Fisik	Penyelenggaraan Komunitas Ibu Cerdas Cegah Stunting	Desa Tanete
3.	Fisik	Peningkatan Jalan Tani Dusun Lo'ko	Dusun Lo'ko
4.	Fisik	Peningkatan Jalan Tani Dusun Menyamba	Dusun Menyamba
5.	Fisik	Peningkatan Jalan Tani Dusun Bola padang	Dusun Bola padang
6.	Fisik	Pemeliharaan Sumber Air	Dusun Lo'ko
7.	Fisik	Pengadaan Bibit Penghijauan	Desa Tanete
8.	Fisik	Pengadaan Lampu Jalan	Desa Tanete
9.	Fisik	Pengembangan Wisata Goa Nipe	Dusun Bola padang
10.	Non Fisik	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum	Desa Tanete
11.	Fisik	Rehabilitas Masjid	Dusun Menyamba
12.	Non Fisik	Pembinaan Karang Taruna (Di Tingkat Olahraga)	Desa Tanete

13.	Fisik	Pengadaan Bibit Jagung/ Padi	Desa Tanete
14.	Non Fisik	Pelatihan Bagi Kepala Desa Dan Aparatur	Desa Tanete
15.	Non Fisik	penambahan Modal Bumdes	Desa Tanete
16.	Fisik	Penanggulangan Bencana	Desa Tanete
17.	Fisik	Pengadaan Damkar Ringan	Desa Tanete
18.	Fisik	Bantuan Dalam Keadaan MenDesak	Desa Tanete
19.	Fisik	Lanjutan pembangunan jembatan gantung	Dusun Bola padang

Sumber: Pemerintah Desa Tanete

Data di atas menunjukkan bahwa penentuan prioritas Pembangunan tetap memperhatikan sebaran Pembangunan serta telah mencakupi semua sektor kehidupan Masyarakat. Dari 3 Dusun yang ada di Desa Tanete , masing-masing memiliki pembangunan fisik. Peningkatan peningkatan kondisi jalan menjadi salah satu prioritas karna jalan merupakan factor vital yang dapat mendukung aksesibilitas Masyarakat di Desa, serta berpengaruh juga terhadap perekonomian Masyarakat.

4. Akuntabel

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. Daerah, akuntabel diartikan sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan Pembangunan daerah harus dapat di pertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap penyusunan rencana Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Tanete diawali dengan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa tahun 2023. Ada 2 cara yang dilakukan dalam penyusunan draft RKP Desa, yaitu lokakarya dan rapat kerja. Lokakarya adalah penyusunan draft RKP Desa dengan melibatkan masyarakat dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Seperti pemaparan pengkajian ulang dokumen RPJM Desa, penyepakatan masalah prioritas, penyepakatan platfon anggaran perbidang agar tidak berfokus pada bidang infrastruktur saja, penyusunan table kegiatan berdasarkan sumber anggaran serta penyusunan dokumen draft RKP Desa. Sedangkan rapat kerja merupakan kegiatan penyusunan draft RKP Desa tanpa melibatkan masyarakat, hanya dihadiri oleh Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) beserta pemandu. Hal tersebut dilakukan karena hasil dari rapat kerja akan disampaikan saat pelaksanaan Musrenbang Desa untuk mendapat tanggapan dari masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penyusunan draft RKP Desa di Desa Tanete dilakukan melalui rapat kerja. Dihadiri oleh kepala Desa selaku Pembina serta tim penyusun RKP Desa tahun 2023 yang diketahui di ketuai oleh ABD JALIL R S.Pd beserta 1 sekretaris yaitu UMAR S.Pd dan 5 anggota. Rapat kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juli 2022 bertepatan di kantor Desa Tanete. Hasil rapat kerja di sampaikan kepada Masyarakat dalam Musrenbang Desa yang di adakan Hari Rabu, 28 September 2022 sebagai bukti akutabilitas pemerintah Desa dalam menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Desa.

Tabel 5. 3 Realisasi Anggaran Belanja Setiap Bidang Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Bidang pemerintahan	513.807.698,0 0	470.195.358,0 0	43.612.340,0 0
2	Bidang Pembangunan	765.130.000,0 0	733.212.300,0 0	31.917.700,0 0
3	Bidang pembinaan	14.340.859,00	8.738.000,00	5.602.859,00
4	Bidang pemberdayaan	104.930.000,0 0	99.680.000,00	5.250.000,00
5	Bidang tak terduga	92.800.000,00	82.800.000,00	10.000.000,0 0

Sumber : Bendahara Desa *Tanete*

Selain adanya pertanggung jawaban pada kegiatan Musrenbang pemerintah Desa juga menunjukkan adanya pertanggung jawaban selama proses Pembangunan dilakukan. Realisasi anggaran di atas menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban yang digunakan pada setiap bidang yang ada diDesa. Dana yang digunakan dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan pendapatan asli daerah. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dalam realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang di anggarkan. Salah satunya pada bidang pemerintahan yang semula anggrannya sebesar Rp. 513.807.698 tapi dala rialisasinya masi baru terlaksana sebesar Rp. 470.195.358 Sehingga masi terdapat sisa sebesar Rp. 43.612.340 yang belum terealisasi, berlaku juga di bidang-bidang lainnya. Menurut pemerintah Desa hal tersebut terjadi lantaran dana transfer yang terlambat sehingga masih ada kekurangan dari yang sebelumnya dianggarkan.

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk mencapai perubahan di Masyarakat terhadap sektor perekonomian dan sosial budaya. Sehingga dalam penelitian ini Peneliti menanyakan Apakah pemberdayaan di Desa Tanete telah berhasil mencapai perubahan di Masyarakat baik di sektor perekonomian dan sosial budaya yang langsung di jawab oleh bapak Tari S.Pd

Pemberdayaan di Desa Tanete telah berhasil mencapai perubahan yang signifikan di masyarakat, baik di sektor perekonomian maupun sosial-budaya. Beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan di Desa Tanete Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat Desa. Keberhasilan pemberdayaan di Desa Tanete tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga dari perubahan positif dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dengan demikian, pemberdayaan di Desa Tanete dapat dianggap berhasil karena telah mencapai perubahan yang signifikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanete untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa sehingga berpengaruh juga terhadap meningkatnya perekonomian Masyarakat. pada hasil notulensi rapat tim penyusun Desa Tahun 2023 yang di adakan pada tanggal juni 2022 pengggelolaan pariwisata dan bantu modal UMKM menjadi perhatian di bidang Pemberdayaan masyarakat. Sehingga pariwisata dan UMKM telah menjadi prioritas pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. 2 Wisata Sugai Sumbang



Sumber : Dokumen pribadi peneliti

Tempat wisata ini dulunya merupakan pinggiran Sungai pada umumnya. Namun, Setelah ada Pembangunan akses jembatan Sungai ini sudah menjadi kolam permandian dan pengujungnya pun sudah sangat ramai dan Masyarakat pun berinisiatif

untuk membangun stan jualan dan menambahkan fasilitas umum seperti tempat ganti baju dan pipa air untuk memperindah tempat wisata. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di tempat wisata Sungai sumbang diperoleh informasi bahwa untuk pengelolaan tempat wisata tersebut sungai sumbang tersebut sepenuhnya masih di kelola oleh kelompok Masyarakat yang ada di Dusun Bola padang,

6. Keberlanjutan

Keberlanjutan diartikan bahwa perencanaan tidak dapat berhasil pada satu tahapan, tetapi harus berjalan terus-menerus untuk menjamin kesejahteraan Masyarakat serta perlu adanya evaluasi untuk melakukan perbaikan selama proses perencanaan dilakukan. Kemudian Penelitian Bagaimana keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan harus diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sebelumnya Menurut pemerintah Desa keberlanjutan program Pembangunan yang telah direncanakan dalam Musrenbang Desa, pengawasan pada program Pembangunan, serta manfaat yang di terima Masyarakat dari program Pembangunan yang di jalankan.

Pada saat ini yang sementara berjalan adalah Proses Pembangunan jembatan gantung yang terletak di Dusun Bola padang belum selesai 100%. Menurut hasil penelitian dilokasi diperoleh informasi bahwa tahun 2021 memulai Pembangunan 4 pilon setinggi 4x6. Dilanjutkan pada tahun 2022 pembangunan akngkur tumpuan dan tali bentangan. Dan pada tahun 2023 anggaran lanjutan dari dana tahun 2022. apabila 1 program pembangunan tidak terselesaikan dalam satu waktu sekaligus.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sarana pemerintah di seluruh tingkat untuk menghimpun aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah cerminan praktik partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemerintahan. Baik dari jajaran pimpinan Daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu kemudian berbincang mengenai program daerahnya dengan tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Wasil, 2020:57).

Berdasarkan informasi yang di peroleh selama wawancara dan observasi serta beberapa dokumen terkait pelaksanaan Musrenbang di Desa Tanete dapat di katakana bahwa pelaksanaan Musrenbang telah berpedoman pada aturan-a turan yang telah ada di Tingkat Kabupaten. Kegiatan Musrenbang Desa Tanete menunjukkan bahwa dalam pembangunan perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Seluruh elemen masyarakat yang ada harus turut andil dilibatkan untuk dapat mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai wadah aspirasi Masyarakat.

Selama pelaksanaan Musrenbang di Desa Tanete kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah Desa dan masyarakat. Melibatkan masyarakat

dalam segala program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah Desa, termasuk dalam pelaksanaan Musrenbang Desa. Hal tersebut sebanding dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dijalankan. Selain dengan masyarakat, kerjasama antar lembaga dalam pemerintahan Desa seperti kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga masyarakat lain juga berjalan baik.

Sesui dengan penelitian yang dilakukan oleh Inda Putri Kurniawan (2022) Dimana hasil penelitian mengatakan bahwa Semua pihak memiliki kontribusi dalam Musrenbang Desa. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa, hubungan antar elemen masyarakat perlu dipertahankan dengan menjaga komunikasi yang baik.

2. Peningkatan pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Pembangunan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan adanya perubahan baik infrastruktur maupun struktur sosial. Menurut Syaifullah (2008) pembangunan berkaitan dengan 2 jenis, yaitu pembangunan yang bersifat fisik berupa fasilitas umum dan sarana prasarana serta pembangunan bersifat non fisik seperti pembinaan keterampilan masyarakat dan upaya peningkatan kualitas masyarakat.

Peningkatan pembangunan Desa mengacu pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di Desa. Proses ini melibatkan sejumlah langkah dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan penelitian ini pemerintah di Desa Tanete selalu mengkedepankan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sebagaimana yang diketahui program Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan terkhusus Desa Tanete melalui berbagai kegiatan Pembangunan. Dapat dilihat Pembangunan di Desa Tanete mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun terdapat beberapa kendala seperti terlambatnya Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah di Desa Tanete dapat menjalankan kegiatan dalam setiap bidang secara seimbang. Seperti yang dikatakan pemerintah Desa Tanete semua usulan yang ada di dalam Musrenbang terkait dengan Pembangunan tetap disaring untuk memilih skala prioritas yang perlu dibangun atau berdayakan.

Perencanaan dalam prosesnya dipengaruhi oleh beberapa prinsip dimulai dari prantisipasi yang merujuk pada partisipasi Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan maupun Pembangunan Desa. Selanjutnya transparansi yang harus dalam mengelola pembangunan yang sedang dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Desa dalam memberikan informasi terkait kegiatan Musrenbang dan pelaksanaannya dan semua bentuk Pembangunan yang sedang dijalankan di Desa harus disebarluaskan agar masyarakat mengetahui adanya Pembangunan Desa bisa digunakan media seperti

spanduk dan banner atau undangan yang berisi informasi. Adapun prinsip selanjutnya yakni selektif di artikan sebagai seringan untuk memilih program prioritas Pembangunan jadi Masyarakat harus memperhatikan urgensitas suatu permasalahan yang terjadi di Desa. Proses perencanaan Pembangunan juga harus memperhatikan akuntabel setiap kegiatan dari awal hingga akhir perencanaan Pembangunan kemudian yang terpenting juga yakni pemberdayaan dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang di maksud iyalah cakupan perubahan di masyrakat terhadap sektor perekonomian dan sosial budaya seingga mengembangkan potensi yang ada di Desa dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Tentu perencanaan Pembangunan harus bersifat berkelanjutan berjalan sestematis sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak lupa mengadakan evaluasi sebagai bahan perbaikan .

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh indah Putri Kurniawati (2022) analisis pelaksanaan Musrenbang Desa terhadap peningkatan pembangunan di Desa Gayam Kabupaten Kediri. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Pembangunan di Desa Gayam mengalami peningkatan Pembangunan setiap tahunnya.

KESIMPULAN dan SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Terhadap Peningkatan Pembangunan terlaksana dengan baik terbukti dari kegiatan Musrenbang yang melibatkan masyarakat dan bagaimana kerja sama dengan pemerintah Desa setempat. Pada saat pelaksanaan Musrenbang Masyarakat datang tidak hanya untuk menyepakati usulan terkait pembangunan yang akan dijalankan, tetapi juga saling mengajukan pendapat masing-masing.

Menurut pemerintah Desa Tanete Pembangunan yang ada di Desa Tanete setiap tahunnya mengalami peningkatan Pembangunan, pemerintah di Desa juga selalu mengkedepankan Pembangunan yang perlu di kedepaankan dan selalu menentukan Pembangunan skala prioritas baik Pembangunan fisik maupun non fisik. Dan pada saat musrenbang di Desa semua elemen masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa bisa memberikan tambahan usulan dan saran . Namun bisa atau tidaknya usulan tersebut dijalankan tetap menyesuaikan kondisi keuangan Desa

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada terkait permasalahan yang ada di Desa Tanete , Adapun beberapa saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Untuk pemerintah Desa setempat di harapkan Lebih memperhatikan pengelolaan tempat wisata
2. Memprioritaskan Pembangunan pada usulan yang belum terlaksana di tahun-tahun sebelumnya.
3. Lebih memperhatiak BUMdes untuk kedepanya.
4. Tetap mengkedepankan Pembangunan yang menjadi prioritas
5. Menyelesaikan Pembangunan yang sementaraa berkelanjutan

- Arida, I. N. S., Wiguna, P. P. K., Narka, I. W., & Febrianti, N. K. O. (2017). Development Planning of Tourist Village Using Participatory Mapping (Case study: Mambal Village, Badung Regency, Indonesia). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 98(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012044>
- Djohani, R. (2016). Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. <http://kawasan.bappenas.go.id/Musrenbang> diakses pada Senin, 20 Desember 2021
- Fajar Ladung. (2023). Implementasi Program Kegiatan Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang
- G. Rumegang, J. E. Kaawoan, dan I. Sumampouw, "Efektivitas Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talud," *Governance*, vol. 1, no. 2, hal. 1–11, 2021
- Indah putri kurniawati, 2022. Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri
- Irawan 2017. "Analisis pengaruh daya tarik wisata, persepsi harga, dan kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung ulang dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening" *Jurnal penelitian manajemen* vol 1 No 2, 2017 Talud, "Governance", vol. 1, no. 2, hal. 1–11, 2021
- La Sumianto, "Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi". *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 3 No. 2, September 2018, hal. 34.
- Lasri, 2018. Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Batu Ke"de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.
- Ma"rif, S., Nugroho, P., dan Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11). [http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawah_Perencanaan_Pembangunan_\(Musrenbang\)_Kota_Semarang__SAMSUL._M_dkk.pdf](http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawah_Perencanaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang__SAMSUL._M_dkk.pdf) diakses pada Kamis, 23 Desember 2021
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).
- Nur fitrah, 2017. Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (rkpd) Provinsi Bali Tahun 2015

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Puspitaningrum, Wanodya, dkk. 2017. Pengaruh Media Booklet Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Terkait Kebersihan Dalam Menstruasi di Pondok Pesantren Al-Ishlah Demak Triwulan II Tahun 2017. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 4(5): 274-281

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Ritonga, F. A. Skripsi. "Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur PeDesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu". (Medan: USU, 2017), Hal. 2-3.

R. Tamin, M. Sarjan, dan R. R, "Sistem Integrasi Data Musrenbang Desa Berbasis Web," J. Ilm. Ilmu Komput., vol. 5, no. 1, hal. 7–12, 2019, doi: 10.35329/jiik.v5i1.25.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta,Bandung

Salim, E. (2018). Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan. Jakarta: Inti Indah

Sujono, Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)

